

PERAN PEMIMPIN DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI KOTA CIREBON

Akhmad Muzadi¹

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang oleh peran pemimpin dalam pengelolaan pariwisata di Kota Cirebon. Pemerintah Kota Cirebon merupakan organisasi pemerintah yang memiliki pemimpin yang diharapkan dapat memajukan pariwisata yang berada di Kota Cirebon. Karena peran pemimpin yang sentral tentu dapat memberikan dampak yang positif terhadap pariwisata di Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yakni menelusuri, mengumpulkan data, mencatat data tertulis dan keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen yang berisikan peraturan-peraturan hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan teori Reinventing Government dari David Osborne dan Gaebler yaitu Pemerintahan yang digerakkan oleh misi. Hasil penelitian ini, peran pemimpin merupakan terpenting dalam roda pemerintahan karena sebagai pemimpin yang sah dan berketetapan hukum yang diterima dan diabsahkan oleh masyarakat dapat menjalankan pemerintahannya, salah satunya dalam hal ini ialah pemerintahan yang digerakkan oleh misi, tentu dapat dipahami bahwa sinkronisasi antara visi dan misi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Cirebon menjadi titik berat dalam hal ini pengelolaan pariwisata yang berada di Kota Cirebon. Tidak lupa pula pemimpin juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Kota Cirebon dalam pengelolaan pariwisata Kota Cirebon.

Kata Kunci : *Peran Pemimpin, Pengelolaan, Pariwisata*

Abstract

This research is based on the role of leaders in tourism management in the city of Cirebon. Cirebon city government is a government organization that has a leader who is expected to advance tourism in the city of Cirebon. Because, the central role of the leader can certainly have a positive impact on tourism in the city of Cirebon. This research uses the literature method (library research) with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques that are searching, collecting data, recording data, written and scientific information from books, journals, and documents containing legal regulations, opinions, theories from experts relating to the research conducted. This study uses the theory of Reinventing Government from David Osborne and Gaebler, government driven by mission. The results of this study, the role of the leader is most important in the wheels of government because as a legitimate leader and the determination of the law accepted and validated by the community can run their government, one of them in this case is a government driven by mission, certainly it can be

¹ Universitas Diponegoro (amuzadi19@gmail.com)

understood that synchronization between vision and mission with the medium-term development plan of the Cirebon city area becomes the focus in this case the management of tourism in the city of Cirebon. Do not forget also the leader also needs the support of all elements of the city Cirebon in the management of tourism in the city of Cirebon.

Keywords : *The role of Leaders, Management, Tourism*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya berdasarkan asas otonomi daerah. Hal ini memberikan sesuatu yang positif bagi setiap pemimpin daerah, karena dapat membuat atau mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing melalui peraturan daerah (perda) untuk melaksanakan visi dan misi dari pemimpin daerah tersebut.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003), “Kepemimpinan adalah gejala sosial. Kemampuan seseorang (suatu pihak) untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga (agar) perilaku orang lain itu berubah atau tetap, menjadi integratif, disebut kepemimpinan. Dalam situasi integratif itu, seseorang menjadi akseptabel bagi orang lain, *wenness* terbentuk. Orang yang (terbukti) memiliki kepemimpinan disebut pemimpin. Jadi, pemimpin itu tidak *given*, melainkan *achived*. Hasil kegiatan memimpin suatu unit kerja disebut pimpinan”(p.216)

Menurut SF Mabrun (1996), “Otoritas merupakan bentuk khusus dari kekuasaan karena dengan otoritas baru terlihat bahwa suatu kekuasaan diterima dan diabsahkan. Dengan demikian dalam suatu pemerintahan otoritas akan terwujud dan berfungsi sebagai pemerintahan karena itu otoritas disebut kekuasaan yang dilembagakan”(p.33)

Menurut Max Weber (dalam SF Mabrun, 1996:33) keharusan bagi otoritas ialah keabsahan (legitimasi) dan keabsahan itu selalu dihubungkan dengan hukum. Otoritas sah apabila otoritas diterima oleh pengikutnya sebagai sesuatu

yang mengikat. Jadi, otoritas itu menuntut adanya ketaatan. Otoritas yang tahan lama ialah otoritas yang sah. Otoritas berhak menuntut ketaatan dan berhak pula memberikan perintah.

Dari dua penjelasan di atas bahwa, ada sebuah kesamaan konsep dalam Kepemimpinan dan Otoritas, bahwa kepemimpinan merupakan cara untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu agar perilaku orang lain itu berubah atau tetap. Sedangkan, otoritas ialah bentuk khusus dari kekuasaan yang dapat diterima, diabsahkan, dan dilembagakan. Oleh karena itu, otoritas sah apabila diterima oleh pengikutnya sebagai suatu yang mengikat sehingga dapat menuntut ketaatan dan berhak pula memberikan perintah. Maka, kepemimpinan yang memiliki otoritas ialah cara untuk mempengaruhi orang lain dengan kekuasaan yang dimiliki dari seorang pemimpin tersebut yang dapat diterima, diabsahkan dan dilembagakan sehingga dapat menuntut ketaatan dan berhak pula memberikan perintah.

Menurut G. U Cleeton dan C. W. Mason (dalam Inu Kencana, 2011:185) *“Leadership indicates the ability to influence man and secure results through emotional appeals rather than through the exercise of authority”*. Maksudnya Kepemimpinan menunjukkan kemampuan mempengaruhi orang-orang dan mencapai hasil melalui imbauan emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan.

Didalam sebuah kepemimpinan tentu membutuhkan sebuah koordinasi yang baik antara pemimpin maupun yang dipimpin hal ini tentu menjadi langkah yang dapat memberikan sebuah keharmonisan dalam memimpin pemerintahan, Menurut Leonard D. White (dalam Inu Kencana, 2011:187) *“Coordination is the adjustment of the parts to each other, and of the movement and operation of parts in time so that each can make its maximum contribution to the product of the whole”*. Maksudnya koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Didalam sebuah kepemimpinan memiliki sebuah gaya kepemimpinan hal ini dikarenakan bagaimana cara seorang pemimpin tersebut membuat suatu

keputusan yang akan menjadikan identitas dirinya dalam memimpin sebuah pemerintahan, Menurut Taliziduhu Ndraha (2003), “Jika hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin didasarkan pada perukaran kepentingan (*exchange*) masing-masing (saling membutuhkan menuju saling menguntungkan), maka kepemimpinannya disebut kepemimpinan transaksional. Pemimpin transaksional pada umumnya adalah para kepala yang berpimpinan (eksekutif dan sebangsanya). Hal ini jelas bahwa seorang pemimpin merupakan ujung tombak dalam menggerakkan roda pemerintahan bahwa yang memimpin merupakan orang yang dapat menghasilkan keuntungan antara yang dipimpin maupun yang memimpin karena itu bersifat simbiosis mutualisme (saling menguntungkan)”(p.222)

Didalam sebuah pemerintahan tentu memiliki pemimpin yang dapat menjalankan roda pemerintahan, hal tersebut sangat jelas menguntungkan bagi seorang pemimpin karena seorang pemimpin memiliki kekuasaan yang terikat dengan hukum tetap sehingga dapat diterima/diabsahkan oleh masyarakatnya yang sudah memilih, tentu dalam pemimpin mempunyai visi dan misi yang harus dikerjakan ketika sudah terpilih menjadi penguasa. Didalam konsep *reinventing government* harus dikuasai oleh aparat birokrasi pemerintah daerah, pimpinan instansi atau dinas di daerah dan terutama bupati atau walikota. David Osborne dan Gaebler (dalam Annisa, 2017:91) mengemukakan sepuluh cara untuk membentuk birokrasi-wirausaha yang salah satunya adalah pemerintahan yang digerakkan oleh misi, mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan. Pemerintah memberikan kesempatan dan kebebasan berkreasi dan berinovasi kepada unit-unit pemerintahan sebagai lembaga yang bertugas mewujudkan misi. Oleh karenanya peraturan yang ada untuk ditaati, bukan sebagai penghambat.

Pariwisata merupakan sebuah sisi lain dari pendapatan daerah disamping hal tersebut tentunya penerimaan pajak daerah, hal ini karena dapat menunjang menuju kota yang bernuansakan wisata. sebagaimana yang dapat digali dari seorang pemimpin dalam memimpin daerahnya, tentu hal tersebut merupakan suatu yang baik untuk masyarakat pada khususnya daerah wisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan tentunya pendapatan daerah pun akan terus meningkat.

Pemimpin menjadi salah satu kunci dalam menjalankan pemerintahan yang digerakkan oleh misi, karena lewat pemimpin lah misi tersebut dijalankan oleh para unit-unit pemerintahannya, hal ini pula yang mendorong bahwa dalam pengelolaan pariwisata harus dilakukan hal yang seperti itu, pemimpin memilih dengan pemerintahan yang digerakkan oleh misi, karena itu akan mengakibatkan bahwa unit-unit dari pemerintahan tersebut dapat menjadi kreatif dan berinovasi mengenai potensi pariwisata yang berada didaerah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dengan mekanisme yang sudah disetujui oleh para pemangku kepentingan dan menjadi peletakkan dasar yang tertuang dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah, sehingga keberlanjutan dari pariwisata daerah tersebut tidak berhenti.

Cirebon merupakan sebuah daerah yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh kebudayaan yang tinggi dari berbagai etnis. Etnis Jawa, Sunda, Cina dan Arab menjadi sebuah kesatuan dalam bingkai kehidupan sehari-hari dimasa itu, sebelum akhirnya terjadi pemekaran daerah yang menghasilkan Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini, Kota Cirebon memiliki riwayat sejarah yang panjang melalui peradaban keraton-keraton, karena pada dasarnya hampir seluruh peninggalan sejarah tersebut berada pada wilayah Kota Cirebon, termasuk beberapa keraton yang masih aktif hingga hari ini, yaitu keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Bangunan klenteng tempat peribadatan juga masih rapih dan menjadi tempat destinasi wisata yang ada di Kota Cirebon.

Kota Cirebon berada pada pesisir pulau Jawa menjadi sebuah hal yang biasa untuk wisata pantainya. Namun, ada satu hal yang menarik bahwa terdapat Goa Sunyaragi yang merupakan karang-karang yang dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa dahulunya merupakan daerah lautan karena perkembangan zaman dari waktu ke waktu akhirnya mengalami penyusutan air laut hingga akhirnya Goa Sunyaragi tersebut tepat berada di tengah Kota Cirebon. Pesisir laut menjadi bagian wahana dari Cirebon Waterland, Pantai Pelabuhan dan juga Kejawan yang masing-masing memiliki daya tarik wisata.

Kota Cirebon juga masih memiliki wisata lain yang masih bersentuhan dengan sejarah, yaitu Petilasan Sunan Kalijaga yang biasa orang Cirebon sebut dengan Plangon, berupa hutan yang biasa Sunan Kalijaga melakukan meditasi,

Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

yang pada akhirnya menjadi hutan yang terdapat hewan hidup berupa kera/monyet sehingga menjadi daya tarik wisata yang dikunjungi walaupun hanya untuk sekedar melihat petilasan dan juga memberi makan monyet/kera tersebut.

Pada perkembangannya hari ini, Kota Cirebon mulai menata pariwisatanya melalui beberapa destinasi favorit yang berada di Kota Cirebon, terlebih hari ini pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon juga sangat baik, sarana dan prasarana dalam membangun kota juga sedang dilakukan, seperti hotel, mall ataupun café sudah mulai memberikan dampak yang positif bagi pariwisata Kota Cirebon, artinya bahwa pengunjung tidak hanya mengunjungi satu destinasi wisata saja tetapi bisa melakukan *travelling* Kota Cirebon dengan berbagai makanan khas juga turut mengundang banyak wisatawan baik mancanegara maupun lokal.

Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik Kota Cirebon Jumlah wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kota Cirebon dari Tahun 2013-2017 terus meningkat jumlahnya pada setiap tahunnya, berikut tabel:

Tahun	Wisatawan		Jumlah Total
	M mancanegara	Domestik	
2017	11.558	1.022.086	1.033.644
2016	9.204	831.948	841.152
2015	14.788	671.333	686.121
2014	9.211	242.255	251.466
2013	10.328	530.617	540.945

Sumber: *BPS Kota Cirebon 2018*

Berdasarkan data di atas telah dapat dijelaskan bahwa Kota Cirebon tidak mau kalah dengan kota-kota besar lainnya di Jawa Barat yang telah lama menjadi destinasi wisata terkenal, seharusnya pemerintah Kota Cirebon dapat melihat potensi tersebut, adanya jalan tol Cipali, dibukanya Bandara Kertajati di Majalengka dan tak lupa pula transportasi Kereta Api juga turut menjadi langkah

besar Kota Cirebon dalam pengelolaan Pariwisata yang tentunya akan semakin memiliki daya saing yang tak kalah dengan kota lainnya di Jawa Barat.

Maka, penjelasan yang akan saya paparkan dalam paper ini ialah, Pemimpin menjadi salah satu penentu dalam roda pemerintahan daerah karena bagaimanapun pemimpin memiliki kekuasaan yang sepenuhnya berdasarkan ketetapan hukum yang mengikat artinya bahwa seorang pemimpin daerah harusnya mengerti dan paham tentang sebuah dinamika pemerintahan dan bagaimana peran dari seorang pemimpin dalam pengelolaan pariwisata di Kota Cirebon, berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peluang besar bagi seorang pemimpin dalam hal ini Walikota Cirebon dalam membingkai sebuah pengelolaan wisata yang berada di Kota Cirebon sehingga menjadi sebuah Kota yang diunggulkan dalam hal ini sektor Pariwisata yang tentunya akan berdampak pada perekonomian masyarakatnya dan ikut andil dalam pemasukan produk domestic bruto daerah Kota Cirebon.

METODE PENELITIAN

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), Menurut Zed (dalam Khatibah, 2011:38) riset pustaka ialah penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian Kualitatif. Menurut Creswell (2016), “pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode–metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Ini berarti jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan, menggambarkan, dan melukiskan suatu fenomena yang ada untuk memecahkan suatu masalah dengan mencari data,

menyusun data, mengumpulkan data, menganalisa data dan menginterpretasikan data tersebut. Dalam penelitian ini, sebagian besar data yang ada berupa kata-kata, namun begitu disertakan pula data-data berupa angka”(p.4)

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dalam Sugiyono, 2015:9) adalah seperti berikut:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

Metode penelitian dalam Peran Pemimpin dalam Pengelolaan Pariwisata di Kota Cirebon ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Peran Pemimpin dalam Pengelolaan Pariwisata di Kota Cirebon.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari atas, buku-buku, skripsi, dan jurnal terkait dengan Peran Pemimpin dalam Pengelolaan Pariwisata di Kota Cirebon, sehingga memberikan gambaran dan penjelasan yang kongkrit melalui sumber-sumber data tersebut agar dapat menjadi sebuah penelitian kepustakaan (*library research*) yang utuh.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Berbagai macam teknik pengumpulan data secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi.

Menurut Sugiyono (2015:82), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa studi kepustakaan yakni menelusuri, mengumpulkan data, mencatat data tertulis dan keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen yang berisikan peraturan-peraturan hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun datanya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.
3. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011 – 2031.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023.
5. Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Kota Cirebon dalam angka tahun 2018.
6. Draft visi dan misi Nashrudin Azis dan Eti Herawati.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasution

(dalam Sugiyono, 2013:245) menyatakan. Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Namun, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Display data atau penyajian data

Dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian adalah dengan teks yang bersifat naratif atau penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Visi dari pasangan Nashrudin Azis dan Eti Herawati adalah Sehat Kita wujudkan Cirebon sebagai kota Kreatif berbasis budaya dan sejarah. Kemudian dalam penjabaran misinya dalam bidang ekonomi disebutkan bahwa program promosi kepariwisataan dengan point-point sebagai berikut:

1. Menciptakan event-event dan kalender tahunan wisata Kota Cirebon.
2. Branding kota.
3. Kampong wisata Kota Cirebon.
4. Kerjasama kepariwisataan.
5. Mengoptimalkan wisata religi, keraton (wisata sejarah) dan wisata kuliner sebagai destinasi wisata.
6. Melakukan penataan wilayah pesisir Kota Cirebon untuk dijadikan sentra wisata bahari.
7. Melakukan penataan terhadap keraton-keraton sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di Kota Cirebon.

Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Sedangkan pariwisata itu sendiri sebagai salah satu jenis industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata adalah jumlah kunjungan wisatawan Kota Cirebon sebagai kota yang memiliki keanekaragaman budaya yang mempunyai kesempatan untuk menjual atraksi budayanya kepada wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara yang akan menikmati budaya tersebut. Tentu saja kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dalam lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestik pada suatu objek wisata akan meningkatkan pendapatan daerah. Konsumsi wisatawan cenderung akan meningkatkan output barang dan upah disektor yang menjual barang maupun jasa kepada wisatawan. Konsumsi wisatawan akan menciptakan permintaan baik barang maupun jasa yang pada akhirnya akan menimbulkan kegiatan produksi baik barang maupun jasa yang secara otomatis akan memberikan nilai tambah kepada pendapatan regional khususnya Produksi Dometik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah.

Kota Cirebon memiliki destinasi wisata yang cukup terkenal, terutama dengan adanya Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Keraton Kaprabonan, Situs Gua Sunyaragi, dan lain-lain.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan event-event, promosi wisata, penyediaan sarana dan prasarana wisata, sehingga wisatawan dapat lebih mengenal objek wisata yang ada di Kota Cirebon dan tertarik untuk berkunjung.

Dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon tersebut, sudah barang tentu akan membawa dampak yang positif terhadap perekonomian Kota Cirebon seperti yang ditunjukkan kontribusi sektor wisata yang selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, bagi pengambil kebijakan dan para pelaku penyedia jasa pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swasta harus tetap bisa menjalankan fungsinya masing-masing, agar setiap wisatawan yang datang ke Kota Cirebon tetap merasa nyaman.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Cirebon direpresentasikan melalui penyediaan akomodasi makan dan minum sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB Kota Cirebon
Tahun 2013 – 2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	5,01	5,11	5,14	5,23	-

Sumber : *BPS Kota Cirebon 2018*

Didalam sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018 – 2023. Tentu memiliki prioritas pembangunan pada setiap tahunnya, dapat dilihat bahwa prioritas tersebut menjawab pengelolaan pariwisata yang berada di Kota Cirebon menjadi sangat penting yang dituangkan dalam rencana pembangunan lima tahun mendatang, berikut tabelnya:

Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon Tahun 2018-2023				
2019	2020	2021	2022	2023
Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata berbasis budaya dan sejarah.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang industri pariwisata, pembangunan akses jalan yang memadai serta penyiapan SDM kepariwisataan yang berkualitas.	-	-	-
	Penataan dan pengembangan destinasi wisata berbasis budaya dan sejarah.			

Sumber: *RPJMD Kota Cirebon 2018 – 2023*

Beberapa hasil yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon dalam Pengelolaan Pariwisata mengenai target dan capaian selama kurun waktu empat tahun dapat dilihat melalui tabel berikut:

Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan							
	2014		2015		2016		2017	
	Target	Capai	Target	Capai	Target	Capai	Target	Capai
Meningkatnya kunjungan wisatawan sebesar 5% dari tahun sebelumnya	526.268	596.04		686.121		831.152	609.221	899.097
Obyek dan Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	-	-	-	-	-	-	1Kawasan	-

Jumlah kerjasama kepariwisataan	2Jenis	-	-	-	1Jenis
	2Jenis	2Jenis	2Jenis	2Jenis	

Sumber: *RPJMD Kota Cirebon 2018 – 2023*

Namun, disisi lain Pemerintah Kota Cirebon juga sudah membuat rancangan pembangunan jangka menengah daerah yang tentunya memiliki target dan capaian yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Cirebon dalam Pengelolaan Pariwisata yang lebih baik lagi bagi Kota Cirebon, dapat dilihat melalui tabel berikut:

Indikator kinerja tujuan/sasaran	2019		2020		2021		2022		2023	
	Target	Rp								
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 80%	2.031.142 orang	1.679.475.000	2.331.142 orang	2.240.000.000	2.631.142 orang	2.494.000.000	2.931.142 orang	2.768.400.000	3.231.142 orang	3.065.240.000
Meningkatnya lama kunjungan wisata	2Hari		2Hari		2Hari		3Hari		3Hari	
Peningkatan PAD dari Kepariwisata	75%		-		-		-		-	

Sumber: *RPJMD Kota Cirebon 2018 – 2023*

Pembahasan

Pariwisata merupakan suatu ciri khas dari masing-masing daerah yang menjadikan daerah tersebut sangat banyak dikenali karena sebuah destinasi wisatanya, hal tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi Pemerintah Daerah yang sangat mendukung penuh dengan adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan memberikan seluas-luasnya seorang Pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahannya, salah satunya adalah pengelolaan Pariwisata agar dapat berkembang dan menjadi potensi pendapatan daerah yang dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat dan nilai tambah dari daerah tersebut.

Kota Cirebon merupakan kota yang memiliki banyak potensi pariwisata yang ada didalamnya, dari mulai sejarah, religi, budaya dan pantainya. Karenanya kota Cirebon berada dalam rangkaian pantai utara pulau Jawa dan kota Cirebon

Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

juga merupakan perpaduan antara sunda, jawa dan cina sehingga akulturasi pun tak bisa dihindarkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat kota Cirebon bahkan Cirebon itu sendiri merupakan suku yang berbeda diantara sunda dan jawa. Hasil dari beberapa budaya yang masuk dan juga ikut tinggal bersama dengan waktu yang cukup lama ialah bangunan peribadatan yang memiliki ciri khasnya masing-masing sesuai dengan karakteristik dari agama tersebut, yang hingga saat ini masih tetap menjadi sebuah bangunan tua yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi apabila berkunjung di Kota Cirebon.

Didalam praktek dan usahanya, Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke Kota Cirebon seperti yang dikatakan oleh Wakil Walikota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati

“Cirebon (Ciayumajakuning) siap menjadi gerbang pariwisata Jawa Barat menyongsong wisatawan yang datang dari dalam dan luar negeri, kami akan bekerjasama termasuk dengan stakeholders menyambut pariwisata yang lebih maju.”(cirebonkota.go.id, dikutip pada tanggal 08/10/19).

Hal serupa juga disampaikan oleh Walikota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH mengenai persoalan kegiatan Cirebon Festival yang menurutnya akan menjadi agenda tahunan untuk dapat mendongkrak kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon, berikut pernyataannya

“Dengan dilaksanakan Cifest tentu harapan terdepan dapat mewujudkan Cirebon menjadi Kota pariwisata terdepan dan termaju. Rencana kami akan melaksanakan Cifest kegiatan tahunan sehingga menjadi agenda para wisatawan yang datang ke Cirebon.” (cirebonkota.go.id, dikutip pada tanggal 08/10/19).

Menurut Ella Wargadinata (2016), “Fungsi kepemimpinan menjadi isu sentral ketika lingkungan eksternal berubah demikian besar dan tuntutan internal semakin tinggi. Kepemimpinan modern haruslah memperhatikan keterkaitan ketergantungan antar komponen, memahami kompleksitas masalah, sekaligus menyadari keterbatasan yang dimiliki yang memaksa konsep kepemimpinan haruslah berubah untuk bisa menghadapi itu semua. Kepemimpinan tidaklah digambarkan sebagai garis lurus dari atas ke bawah, kepemimpinan modern adalah bagaimana menciptakan cara/media kepada semua pihak untuk berkontribusi untuk mewujudkan sesuatu yang hebat yang diinginkan”(p.10)

Menurut Soekanto (2011), “Konsep tentang kepemimpinan erat kaitannya dengan kekuasaan dan wewenang, kekuasaan (*power*) adalah setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak lain, sedangkan wewenang (*authority*) adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Penggunaan wewenang timbul tatkala masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya. Maka kekuasaan tanpa wewenang disebut sebagai kekuatan yang tidak sah. Kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat yang disebut sebagai wewenang” (p.15)

Pada penjelasan lain menurut Stogdill (2012), “membagi tiga golongan kepemimpinan, yaitu Pertama, Kepemimpinan sebagai pusat proses dan gerakan kelompok. Kedua, Kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi. Ketiga, Kepemimpinan sebagai pembedaan kekuasaan, diferensiasi peranan, dan inisiasi struktur. Oleh karenanya, tidak ada satu definisi kepemimpinanpun yang dapat dirumuskan secara sangat lengkap untuk mengabstraksikan perilaku sosial atau perilaku interaktif manusia didalam organisasi yang memiliki regulasi dan struktur tertentu, serta misi yang kompleks” (p.19)

Ada banyak sekali potensi-potensi wisata yang hadir di Kota Cirebon selain dari pada hal yang telah dijelaskan di atas, tentu saja banyak cara juga untuk dapat melakukan hal tersebut sebagai bagian dari pengelolaan pariwisata Kota Cirebon, tetapi hal tersebut bergantung kepada peran pemimpin dalam melakukan pengelolaan pariwisata yang ada di Kota Cirebon, karena bagaimanapun sosok pemimpin merupakan kunci dibalik semua kegiatan dan program yang ada termasuk didalamnya adalah pariwisata. Pemimpin yang memiliki kekuasaan yang sah tentu dapat mempengaruhi orang-orang yang berada disekelilingnya, tentu hal ini sudah menjadi sebuah kewajiban dari seorang pemimpin untuk dapat mengayomi, senantiasa memberikan ide-ide dan gagasan kepada para pemangku kepentingan baik dalam ranah legislatif maupun eksekutif.

Kepemimpinan Walikota Cirebon menjadi sangat penting dalam pengelolaan pariwisata di Kota Cirebon, karena dari seorang pemimpin lah yang akan menentukan arah petunjuk untuk dapat memberikan sebuah hal positif bagi Kota Cirebon khususnya dalam pariwisata, diperlukan sebuah konsep yang

matang dari seorang pemimpin untuk dapat mengelola pariwisata yang berada di Kota Cirebon dengan serius dan terencana agar dapat meningkatkan daya tarik pariwisata Kota Cirebon.

Adanya konsep mengenai pemerintahan yang digerakkan oleh misi tentu menjadi sebuah hal yang sangat mudah diterima oleh seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan yang sah sehingga dapat dengan mudah memberikan arahan sesuai dengan instruksi dari pemimpin dalam hal ini walikota Cirebon dalam menjalankan roda pemerintahannya dengan mengelola pariwisata, karena dengan begitu tentu para unit-unit pemerintahan daerah Kota Cirebon atau dapat disebut juga dengan Satuan Perangkat Daerah dapat menjalankan sesuai dengan arahan misi dari seorang Walikota Cirebon dalam mengelola pariwisata yang ada di Kota Cirebon, para perangkat daerah Kota Cirebon akan bebas berkreasi dan berinovasi dalam menata, mengelola dan memanfaatkan pariwisata Kota Cirebon dengan tepat dan benar karena sudah sesuai dengan arahan dari misi walikota Cirebon yang terdapat dalam peraturan yang sah yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah dan peraturan tersebut bukan penghambat dari kebebasan dan inovasi yang dilakukan oleh satuan perangkat daerah Kota Cirebon dalam Pariwisata.

Namun, apabila dicermati bahwa terdapat sebuah kejanggalan ketika peneliti membaca dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018 – 2023, khususnya pada bagian prioritas pembangunan jangka menengah, pembahasan mengenai pariwisata terbilang sedikit dan hanya dalam jangka waktu dua tahun saja yakni tahun 2019 dan 2020 selebihnya tidak ada lagi prioritas pembangunan jangka menengah mengenai pariwisata, karena bagaimanapun perlu dilakukan setiap tahun dan menjadi agenda tahunan dalam mengelola pariwisata sehingga ada sebuah keberlanjutan dari pariwisata Kota Cirebon.

Tetapi, apabila dilihat dari visi dan misi walikota dan wakil walikota Cirebon terdapat misi yang menjabarkan tentang mengenai program promosi kepariwisataan Kota Cirebon tentu sangat disayangkan, ketika sudah pada tahap yang lebih tinggi malah program tersebut hanya berada dalam kurun waktu dua tahun saja tidak menjadi sebuah misi dan program tahunan yang seharusnya dapat

dilakukan oleh Pemimpin tersebut. Oleh karena itu, penting sekali ketegasan pemimpin dalam hal ini untuk dapat menghadirkan keputusan yang kongkrit dalam menjalankan visi dan misi sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh pemimpin tersebut.

Oleh karenanya, ada sebuah kekeliruan dalam Pemerintahan Kota Cirebon yang dipimpin oleh Nashrudin Azis dan Eti Herawati yang sudah jelas memiliki program tentang kepariwisataan namun tidak menjadi program prioritas pada RPJMD Kota Cirebon, penting bahwa pemerintahan yang digerakkan oleh misi menjadi salah satu pegangan oleh pemimpin dalam merumuskan sebuah program prioritas yang seharusnya dapat menampung semua hal yang sudah menjadi visi dan misi walikota dan wakil walikota Cirebon dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini juga perlu diperhatikan bagi masyarakat Kota Cirebon dalam turut ikut bersama mengkritisi Pemerintahan Azis dan Eti khususnya dalam pengelolaan pariwisata yang ada di Kota Cirebon, dengan cara mengkritik itu merupakan salah bentuk dukungan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemimpinnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, peran sentral pemimpin menjadi sebuah kunci dalam roda pemerintahan khususnya pengelolaan pariwisata, pemimpin sebagai pemilik kekuasaan yang sah tentu memiliki banyak cara untuk mengatur pemerintahannya, salah satunya adalah pemerintahan yang digerakkan oleh misi, tentu dapat dipahami bahwa sinkronisasi antara visi dan misi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Cirebon menjadi titik berat dalam hal ini pengelolaan pariwisata yang berada di Kota Cirebon. Diperlukan pemimpin yang mampu untuk dapat melaksanakan hal tersebut, diperlukan pemimpin yang tegas untuk dapat melaksanakan hal tersebut, diperlukan pemimpin yang konsisten untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Tidak lupa pula pemimpin juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Kota Cirebon dalam pengelolaan pariwisata Kota Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Citra Fatikha, Annisa. (2017). Reinventing Government dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. 8, No. 1
- Creswell, John W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kencana Syafiie, Inu. (2011). *Etika Pemerintahan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'*, Vol. 5, No. 1, Mei 36 – 39
- Mustafa, Hadi. (2011). *Kepemimpinan Karismatik: Studi Tentang Kepemimpinan Politik Megawati Soekarnoputri dalam PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- _____. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- S.F. Mabrun. (1996). Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 6
- Utami Prajayanti, Desy. (2012). *Berkaca Pada Filosofi Tapa Selira “Sang Juragan Kayu” Sebuah Kontruksi Sosial Kepemimpinan Jawa Joko Widodo*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Wargadinata, Ella. (2016). Kepemimpinan Kolaboratif, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. 8 No, 1